



21 Ribu Warga Jogja Kehilangan PBI-JKN

Akibat Pergeseran Desil, Pemkot Siapkan Jamkesda

JOGJA - Sebanyak 21 ribu warga Kota Jogja kehilangan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) akibat pergeseran desil dalam DTSEN. Pemkot Jogja menyiapkan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebagai jaring pengaman agar warga terdampak tetap mendapat layanan kesehatan.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, dari total 21 ribu sudah ada 16 ribu jiwa yang ditangani lewat Jamkesda APBD. Sementara sekitar lima ribu sisanya saat sedang dalam proses verifikasi dan penyalangan ulang. "Masa akan kita kami *stop*? Itu tidak manusiawi. Makanya kami berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan alokasi anggaran Jamkesda dan APBD untuk *njagani* (mengantisipasi) hal tersebut," ujar Hasto saat ditemui awak media di Rumah Dinas Wali Kota, kemarin (28/8).

Hasto menegaskan, jaring pengaman lewat Jamkesda merupakan solusi bagi masyarakat miskin yang terlempar dari desil rendah namun masih membutuh-

kan penanganan kesehatan bersifat darurat. Contohnya, ada mantan peserta PBI-JKN yang masih membutuhkan cuci darah rutin.

Mantan bupati Kulon Progo periode 2011-2019 itu mengaku sudah menyiapkan berbagai kanal aduan bagi masyarakat yang mengalami masalah pergeseran desil. Salah satunya lewat layanan satu atap di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP), Jogja Smart Service (JSS), dan *open house*.

Hasto yakin, APBD Kota Jogja akan cukup untuk membiayai Jamkesda. Termasuk masyarakat yang kepesertaan PBI-JKN hilang akibat pergeseran desil. Pasalnya, pelayanan kesehatan sudah menjadi prioritas bagi pemkot.

"Untuk yang kesehatan, *Insyallah* kami mampu," tegasnya.

Namun di sektor pendidikan, kepala daerah berlatar belakang dokter itu mengakui masih perlu penataan ulang anggaran melalui mekanisme *refocusing*. Ia memastikan program-program pemerintah yang tidak terlalu mendesak akan dialihkan ke sektor pendidikan. Ini agar anak-anak dari keluarga yang terlempar dari status desil tetap bisa mendapatkan hak pendidikan gratis.

Hasto menyatakan, pemkot

juga telah menambah kapasitas kursi pada jenjang SMP. Strategi tersebut diharapkan mampu menampung siswa yang terancam putus sekolah atau tidak mampu membayar biaya sekolah swasta.

"Kemarin pemkot sudah menambah tiga kelas baru untuk tingkat SMP. Tahun depan akan saya tambah lagi, salah satunya kelas olahraga di SMP Negeri 13 Jogja," bebemnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Jogja Waryono memastikan 21 ribu peserta PBI-JKN nonaktif dampak pergeseran desil sudah tertangani Jamkesda tanpa sisa. Sebab berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jamkesda, laporan harus ditindaklanjuti maksimal satu jam.

Menurutnya, Jamkesda juga dimanfaatkan tidak hanya masyarakat yang peserta PBI-JKN dinonaktifkan. Namun selama masyarakat Kota Jogja dan memiliki kedaruratan maka bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Jogja secara gratis. "Untuk anggaran tahun 2026 aman hingga akhir tahun dan awal Januari 2027," tegasnya. (*inu/wia/by*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005